**IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSI: ANALISIS YURIDIS DAN SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN
MANDAT PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
OLEH: PAJRUL FALAQ**

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia: Masalah Struktural yang Perlu Diselesaikan

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing bangsa. Namun, hingga saat ini, ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya sekitar 10-12% dari total populasi usia 19-24 tahun yang berhasil mengakses pendidikan tinggi secara nasional, dan angka ini lebih rendah di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia (BPS, 2023). Ketimpangan ini berakar dari sejumlah faktor, mulai dari disparitas geografis, keterbatasan fasilitas, kualitas pendidikan menengah yang belum merata, hingga hambatan ekonomi yang signifikan. Laporan World Bank (2020) menegaskan bahwa kelompok rumah tangga miskin secara konsisten menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan tinggi. Mereka sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi, di mana rendahnya tingkat pendidikan orang tua mempersempit peluang anak-anak mereka untuk mengakses pendidikan tinggi yang bermutu. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan distribusi fasilitas, tetapi mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial melalui kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok marjinal.

Biaya Kuliah sebagai Hambatan Utama bagi Kelompok Miskin

Salah satu hambatan paling nyata dalam akses pendidikan tinggi adalah tingginya biaya kuliah dan biaya hidup selama masa studi. Meskipun pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema pembiayaan seperti KIP Kuliah dan Bidikmisi, efektivitasnya masih terbatas. Berdasarkan studi oleh SMERU Research Institute (2021), terdapat ketidaksesuaian antara jumlah bantuan dan kebutuhan riil mahasiswa dari keluarga miskin. Banyak di antaranya

masih harus bekerja paruh waktu atau bahkan terpaksa putus kuliah karena tidak mampu menanggung beban ekonomi. Biaya kuliah di perguruan tinggi negeri mengalami peningkatan seiring penerapan kebijakan BLU (Badan Layanan Umum) dan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). Penelitian oleh Yustika dan Suryadarma (2022) menunjukkan bahwa UKT justru memperlebar jurang akses antara kelompok kaya dan miskin, karena kemampuan bayar masih menjadi dasar pengelompokan, bukan semata-mata kemampuan akademik. Akibatnya, pendidikan tinggi semakin menjauh dari jangkauan kelompok miskin dan menjadi privilese kelas menengah ke atas.

Urgensi SDM Unggul dalam Pembangunan Nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, kebutuhan akan SDM unggul menjadi kian mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan kompetisi global. Pemerintah melalui RPJMN 2020–2024 secara eksplisit menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama, dengan menyatakan bahwa “pembangunan SDM merupakan prasyarat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Namun, upaya meningkatkan kualitas SDM tidak akan efektif tanpa jaminan akses yang merata terhadap pendidikan tinggi. Menurut laporan UNESCO (2021), negara-negara dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang tinggi menunjukkan korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, inovasi, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan tinggi seharusnya dipandang bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai hak dasar dan investasi strategis bangsa. Dalam laporan OECD Education at a Glance (2023), disebutkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan pasca-sekolah menengah akan meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan sebesar 9–12%, serta mengurangi ketimpangan sosial. Artinya, membiarkan kelompok miskin tertinggal dari pendidikan tinggi tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga merugikan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

II. LANDASAN FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS

Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi oleh negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya dalam Pasal 26, menegaskan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas, setidaknya pada tingkat dasar dan dasar menengah. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus dapat diakses secara adil oleh semua orang berdasarkan kemampuan." (United Nations, 1948)

Prinsip ini meletakkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai *hak dasar*, bukan sebagai privilese yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Dalam konteks Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

- Ayat (1): *"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."*
- Ayat (2): *"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."*
- Ayat (4): *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."*

Konstitusi ini menjadi dasar hukum bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi. Negara wajib menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan adil termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi.

Filsafat Pendidikan: Pendidikan sebagai Proyek Kemanusiaan

Dalam filsafat pendidikan, para pemikir besar menempatkan pendidikan bukan hanya sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai *proses pembentukan manusia yang merdeka dan demokratis*.

Paulo Freire: Pendidikan sebagai Pembebasan

Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970) mengkritik sistem pendidikan yang bersifat *"banking education"*, di mana siswa diposisikan sebagai objek pasif penerima pengetahuan. Ia menawarkan pendekatan pendidikan yang dialogis, kritis, dan

transformatif, yang memosisikan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membebaskan diri dari penindasan struktural.

Freire menyatakan bahwa pendidikan sejatinya adalah alat pembebasan sosial:

“Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom.” (Freire, 1970)

Dalam konteks pendidikan tinggi, pendekatan Freire mengimplikasikan bahwa akses yang tidak setara terhadap pendidikan adalah bentuk penindasan struktural, dan bahwa demokratisasi pendidikan tinggi adalah bagian dari perjuangan keadilan sosial.

John Dewey: Pendidikan sebagai Sarana Demokrasi

John Dewey, tokoh pragmatisme dan filsafat pendidikan progresif, berpendapat bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari kehidupan demokratis. Dalam *Democracy and Education* (1916), ia menyatakan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Dewey menekankan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengalaman serta kebutuhan sosial peserta didik. Dalam pandangannya:

“A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience.” (Dewey, 1916)

Pendidikan tinggi, menurut Dewey, tidak boleh menjadi arena eksklusif, tetapi harus menjadi sarana membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Perspektif Ideologis: Negara dan Akses terhadap Pendidikan

Berbagai sistem ideologis memberikan makna dan pendekatan yang berbeda terhadap peran negara dalam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Sosialisme: Pemerataan Akses dan Keadilan Sosial

Dalam kerangka sosialisme, pendidikan dipandang sebagai instrumen utama dalam menciptakan *kesetaraan sosial dan keadilan distributif*. Negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin bahwa semua warganya, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Negara-negara dengan tradisi sosial-demokratis seperti Swedia, Finlandia, dan Norwegia telah sejak lama menggratiskan pendidikan tinggi sebagai bentuk realisasi prinsip keadilan

sosial. Hal ini didukung oleh laporan dari UNESCO (2022) yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi yang dibiayai publik secara penuh cenderung meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar generasi.

Neoliberalisme vs Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Neoliberalisme memandang pendidikan sebagai komoditas yang tunduk pada logika pasar. Dalam pandangan ini, pendidikan tinggi tidak lagi dilihat sebagai hak, tetapi sebagai investasi individual yang harus dibiayai oleh mahasiswa itu sendiri. Negara hanya berperan sebagai regulator, bukan sebagai penyedia utama. Pendekatan ini tercermin dalam kebijakan komersialisasi pendidikan, kenaikan biaya kuliah, dan pengurangan subsidi publik. Sebaliknya, model welfare state berpegang pada prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab sosial untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk melalui penyediaan pendidikan gratis atau sangat terjangkau. Dalam sistem ini, pendidikan dipandang sebagai public good, bukan sebagai komoditas. Penelitian oleh OECD (2021) dan UNESCO GEM Report (2022) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem welfare state cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang tinggi, serta ketimpangan pendidikan yang rendah.

III. KAJIAN HISTORIS DAN INTERNASIONAL: SEJARAH DAN PRAKTIK PENDIDIKAN GRATIS DI DUNIA

1. Sejarah Pendidikan Gratis: Akar Filosofis dan Implementasi Global

Pendidikan gratis bukanlah gagasan baru, melainkan hasil dari proses historis panjang yang berakar pada perjuangan sosial dan penguatan peran negara dalam menjamin keadilan sosial. Sejak abad ke-20, pendidikan tinggi mulai dipandang sebagai *public good* di berbagai negara, yang esensinya adalah bahwa manfaat pendidikan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga masyarakat secara kolektif. Berbagai negara telah mengembangkan pendekatan pendidikan tinggi gratis atau bersubsidi kuat, dengan karakteristik berbeda sesuai dengan sistem politik dan ekonominya.

2. Skandinavia: Model Negara Kesejahteraan yang Konsisten

Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia telah lama menjadi simbol keberhasilan model negara kesejahteraan (welfare state) dalam menyediakan pendidikan tinggi gratis.

- Di Swedia, pendidikan tinggi sepenuhnya gratis bagi warga negara dan penduduk tetap sejak 1977. Pemerintah membiayai penuh institusi pendidikan melalui pajak progresif. (OECD, *Education at a Glance*, 2022)
- Finlandia bahkan memperluas kebijakan ini hingga pendidikan doktoral, dan memberikan tunjangan biaya hidup bagi mahasiswa melalui sistem jaminan sosial negara.
- Model Skandinavia menjamin akses merata, kualitas tinggi, dan rendahnya ketimpangan antar kelas sosial dalam partisipasi pendidikan tinggi (UNESCO, 2021).
“The Nordic model combines universal access to higher education with strong public investment and high learning outcomes.” (OECD, 2020)

3. Jerman: Penghapusan Tuition Fee sebagai Reaksi terhadap Komersialisasi

Jerman merupakan contoh negara maju yang menegaskan kembali peran negara dalam menjamin pendidikan tinggi gratis. Sejak 2014, semua negara bagian di Jerman menghapuskan tuition fee di universitas negeri, baik untuk warga Jerman maupun mahasiswa internasional dari negara-negara Eropa.

Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap tekanan publik dan gerakan mahasiswa yang menolak komersialisasi pendidikan. Penelitian oleh DAAD (German Academic Exchange Service) menyatakan bahwa kebijakan ini tidak menurunkan kualitas pendidikan, bahkan meningkatkan partisipasi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah (DAAD, 2019).

“Tuition fees are socially unjust and discourage gifted young people from poorer families from taking up study. The abolition of fees is a step toward educational justice.” (Minister of Education, Lower Saxony, 2014)

4. Amerika Latin: Chili dan Argentina sebagai Contoh Nyata

Argentina

Argentina memiliki tradisi panjang pendidikan tinggi gratis. Sejak reformasi pendidikan 1949 oleh Presiden Juan Perón, universitas negeri di Argentina tidak mengenakan biaya kuliah, dan kebijakan ini terus dipertahankan hingga saat ini. Hal ini menjadikan Argentina sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi tertinggi di Amerika Latin. (UNESCO IESALC, 2020)

Chili

Sebaliknya, Chili sempat menjadi contoh ekstrem dari neoliberalisasi pendidikan pasca era Pinochet. Biaya kuliah tinggi dan sistem pinjaman membuat pendidikan tinggi sulit dijangkau oleh kelompok miskin. Namun, sejak 2016, melalui gerakan sosial masif, pemerintah mulai menerapkan pendidikan tinggi gratis bagi 60% mahasiswa termiskin (OECD, 2019).

“The Chilean experience shows the dangers of market-driven education and the power of collective mobilization in reclaiming education as a right.” (World Bank, 2018)

5. Negara Berkembang: Gerakan Sosial dan Peran Subsidi

Afrika Selatan: "Fees Must Fall"

Gerakan mahasiswa #FeesMustFall yang dimulai pada 2015 menjadi simbol perlawanan terhadap biaya kuliah tinggi di Afrika Selatan. Mahasiswa dari berbagai universitas menyerukan pendidikan gratis sebagai bentuk restitusi sejarah atas ketimpangan rasial pasca-apartheid.

Tekanan ini memaksa pemerintah untuk meningkatkan *National Student Financial Aid Scheme* (NSFAS) secara besar-besaran. Pada 2018, pemerintah mulai menerapkan pembebasan biaya bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. (Booyesen, 2016; Jansen, 2019)

India: Subsidi dan Universitas Negeri

India mengandalkan sistem universitas negeri yang disubsidi kuat, seperti Universitas Delhi dan IITs (*Indian Institutes of Technology*), yang menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya sangat rendah. Pemerintah menyediakan subsidi silang antara mahasiswa, serta bantuan beasiswa dan pinjaman lunak. (The Hindu, 2021). Namun,

tantangan India terletak pada kapasitas terbatas dan kompetisi masuk yang sangat ketat, sehingga masih banyak kelompok miskin yang tereliminasi sejak tahap seleksi awal.

IV. KONDISI OBJEKTIF INDONESIA

1. Tingkat Akses dan Partisipasi Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia—yaitu persentase jumlah mahasiswa terhadap total penduduk usia 19–24 tahun—meningkat dalam dua dekade terakhir, namun masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), APK pendidikan tinggi Indonesia mencapai 31,45% pada tahun 2022, meningkat dari 27,94% pada 2020. Meski mengalami tren positif, artinya hanya sekitar 1 dari 3 anak muda usia kuliah yang benar-benar mengakses pendidikan tinggi.

Sebagai perbandingan, APK di negara-negara Asia lainnya jauh lebih tinggi: Malaysia (43%), Thailand (51%), dan Korea Selatan (98%) (World Bank, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

Ketimpangan Antar Wilayah dan Kelas Sosial

Ketimpangan akses tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar wilayah dan kelas sosial:

- Wilayah perkotaan memiliki APK dua kali lipat lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan (BPS, 2022).
- Berdasarkan kelompok pengeluaran, APK kelompok 20% termiskin hanya 10,5%, sedangkan kelompok 20% terkaya mencapai 60,4% (SMERU Research Institute, 2021).

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih menjadi privilese kelas menengah ke atas, dan bukan hak yang merata bagi semua warga negara.

2. Biaya Pendidikan Tinggi di Indonesia

Struktur UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

Sejak diberlakukannya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013, biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diatur dalam sistem

kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. UKT seharusnya menggantikan biaya-biaya parsial seperti SPP, uang pembangunan, dan lainnya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak celah dan ketidaksetaraan:

- Mahasiswa dari keluarga miskin masih sering masuk ke UKT golongan menengah ke atas karena mekanisme verifikasi ekonomi yang tidak sensitif.
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI)—biaya non-UKT yang dikenakan kepada jalur mandiri di banyak PTN—tidak diatur secara nasional dan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, menciptakan ketimpangan yang masif (Tempo, 2023; Tirto.id, 2022).

Perbandingan PTN vs PTS

Banyak mahasiswa akhirnya memilih Perguruan Tinggi Swasta (PTS) karena keterbatasan daya tampung PTN. Namun, kualitas dan biaya PTS sangat bervariasi:

- PTS unggulan seperti Universitas Bina Nusantara atau Universitas Pelita Harapan menetapkan biaya kuliah yang sangat tinggi, hingga ratusan juta rupiah per tahun.
- Sebaliknya, banyak PTS kecil menawarkan biaya lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas, akreditasi, dan fasilitas yang minim.

Menurut Laporan Kemdikbudristek (2022), sekitar 63% mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di PTS, yang sebagian besar berasal dari kelas menengah bawah.

3. Subsidi Pemerintah yang Ada

Beasiswa KIP Kuliah dan Bidikmisi

Bidikmisi yang diluncurkan pada 2010 dan kemudian dikembangkan menjadi KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) pada 2020 adalah program beasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa miskin dan berprestasi.

- KIP Kuliah mencakup pembebasan UKT dan bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000–Rp1.400.000 per bulan, tergantung daerah.
- Pada 2023, pemerintah menargetkan 200.000 penerima baru KIP Kuliah (Kemendikbudristek, 2023).

Namun, efektivitas program ini masih dipertanyakan:

- Masalah data dan verifikasi menyebabkan banyak mahasiswa miskin tidak lolos seleksi.
- Laporan dari SMERU Research Institute (2022) menyebutkan bahwa hanya sekitar 15–20% dari total mahasiswa miskin yang berhasil mengakses KIP Kuliah.
- Tidak semua program studi dibiayai penuh, terutama di program mandiri atau prodi favorit seperti kedokteran.

LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)

LPDP adalah beasiswa prestisius yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sejak 2012, khususnya untuk program magister dan doktoral, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- Pada 2023, LPDP memberikan lebih dari 6.000 beasiswa, tetapi mayoritas untuk kalangan mahasiswa berprestasi akademik tinggi.
- Fokus LPDP masih sangat elitis dan tidak menysar akar masalah ketimpangan akses pada jenjang S1.

4. Evaluasi Efektivitas dan Jangkauan Program

Berbagai program subsidi dan bantuan yang ada di Indonesia menunjukkan komitmen negara, tetapi belum menyentuh akar persoalan:

Aspek	Temuan
Pemerataan akses	Masih timpang antar kelas sosial dan wilayah.
Skema pembiayaan	UKT tidak adil bagi banyak mahasiswa miskin; dan IPI sangat memberatkan.
Beasiswa pemerintah	Jangkauan KIP Kuliah masih terbatas; LPDP bersifat selektif elitis.
Kualitas vs biaya	Banyak PTS berkualitas tinggi tidak terjangkau oleh kelompok miskin.

Kajian oleh OECD (2021) dan UNESCO GEM Report (2022) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tinggi sangat tergantung pada desain subsidi yang adil dan inklusif, bukan sekadar jumlah nominal anggaran.

V. STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Disusun berdasarkan kajian ilmiah dan sumber terpercaya, menjelaskan bagaimana pendidikan tinggi gratis atau sangat terjangkau dapat diimplementasikan secara *bertahap, terarah, dan berkelanjutan* di Indonesia.

1. Skema Bertahap dan Terarah: Memprioritaskan yang Paling Rentan dan Strategis

Implementasi pendidikan tinggi gratis di Indonesia tidak bisa dilakukan secara instan dan seragam. Diperlukan skema bertahap dan terarah yang mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan dan area dengan ketimpangan tertinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip affirmative action dan *pro-poor policy design* (World Bank, 2020).

Prioritas Penerima:

- Keluarga miskin dan rentan sosial: Berdasarkan data BPS (2023), kelompok 40% terbawah dari segi pengeluaran hanya menyumbang kurang dari 20% dari total mahasiswa perguruan tinggi. Prioritas awal harus diarahkan pada kelompok ini melalui perluasan dan perbaikan skema KIP Kuliah.
- Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar): Wilayah ini mengalami APK pendidikan tinggi di bawah 20%. Misalnya, Papua, NTT, dan Kalimantan Utara (Kemdikbudristek, 2022). Intervensi dapat berbentuk beasiswa penuh, pembukaan kampus satelit, serta tunjangan biaya hidup khusus daerah.
- Program Studi Strategis: Seperti pendidikan guru, kedokteran, STEM, dan pertanian. Memberikan insentif atau pendidikan gratis untuk bidang ini penting untuk mendorong kebutuhan pembangunan nasional dan ketahanan sektor-sektor kritis (RPJMN 2020–2024).

“Skema afirmatif dengan pelibatan wilayah tertinggal dan kelompok miskin akan mempercepat perwujudan keadilan pendidikan.” – SMERU Research Institute (2021)

2. Reformasi Pembiayaan Pendidikan: Negara Harus Mengatur Ulang Prioritas Fiskal Realokasi Anggaran

Indonesia telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4). Namun, hanya sekitar 4–5% dari total anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi, sedangkan lebih dari 60% digunakan untuk pendidikan dasar dan menengah (APBN Kita, Kemenkeu, 2023).

Langkah strategis yang dapat dilakukan:

- Menaikkan alokasi untuk pendidikan tinggi menjadi minimal 10–12% dari anggaran pendidikan nasional secara bertahap.
- Mengurangi pemborosan anggaran melalui audit program-program pendidikan yang tumpang tindih.
- Mengarahkan belanja pendidikan ke program berbasis hasil (outcome-based budgeting): hanya program yang terbukti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang dilanjutkan.

Pajak Pendidikan Tinggi untuk Sektor Privat yang Diuntungkan

Sektor swasta dan industri nasional merupakan beneficiary langsung dari lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, mereka dapat dikenai "Pajak Pendidikan Tinggi" atau *graduate tax* dalam bentuk:

- Kewajiban kontribusi tahunan dari perusahaan besar untuk dana pendidikan (mirip *corporate social investment*).
- Skema insentif pajak untuk perusahaan yang mendanai beasiswa mahasiswa miskin atau riset di kampus.

Praktik serupa diterapkan di negara-negara seperti Australia (HELP Loan Scheme) dan Jerman (industri bermitra aktif dengan universitas melalui pendanaan riset).

“Keadilan fiskal mewajibkan yang diuntungkan oleh sistem untuk turut berkontribusi terhadap keberlangsungannya.” – OECD, *Higher Education Financing*, 2021

3. Keterlibatan Multisektor: Kolaborasi untuk Keberlanjutan

Strategi pendidikan tinggi gratis yang berkelanjutan mensyaratkan kemitraan lintas sektor, tidak semata-mata mengandalkan pemerintah pusat.

Peran BUMN dan Swasta melalui CSR Pendidikan

- **BUMN** seperti Telkom, PLN, dan Pertamina dapat diwajibkan menyisihkan bagian CSR mereka untuk dana pendidikan tinggi, terutama di wilayah operasi mereka.
- Perusahaan swasta nasional dan multinasional juga dapat diarahkan untuk menyalurkan CSR ke bentuk beasiswa, pendirian asrama mahasiswa, atau pembiayaan program magang industri.

Lembaga Filantropi dan Yayasan Pendidikan

- Yayasan seperti Tanoto Foundation, Djarum Foundation, Dompot Dhuafa, dan Baznas telah terbukti berperan dalam mendanai ribuan mahasiswa kurang mampu.
- Pemerintah dapat memfasilitasi platform sinergi nasional yang mengintegrasikan beasiswa publik dan filantropi, dengan sistem seleksi yang seragam dan transparan.

“The future of equitable higher education lies in multi-stakeholder partnerships that align state priorities and private sector capacity.” – UNESCO GEM Report (2022).

4. Evaluasi dan Monitoring: Membangun Sistem yang Akuntabel dan Berbasis Data

Keberhasilan pendidikan tinggi gratis tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dikucurkan, tetapi dari indikator hasil dan dampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi menyeluruh yang mencakup:

Indikator Utama Keberhasilan:

1. Akses: Kenaikan APK, terutama pada kelompok 40% termiskin dan daerah 3T.
2. Retensi: Tingkat kelulusan tepat waktu, penurunan angka putus studi karena faktor ekonomi.
3. Kualitas Lulusan: Daya saing lulusan di pasar kerja, partisipasi dalam inovasi dan riset, serta kontribusi terhadap pembangunan lokal.

Sistem Monitoring Digital

- Pemerintah dapat membangun dashboard nasional ketercapaian pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan data kependudukan, data BPS, dan platform PDDikti.
- Pelibatan lembaga independen seperti BPK, Komnas HAM, atau akademisi penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program.

REFERENSI:

1. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia*. BPS RI.
2. World Bank. (2020). *Indonesia Higher Education: Development Strategy and Equity*.
3. SMERU Research Institute. (2021). *Access and Equity in Higher Education in Indonesia*.
4. Yustika, A.E., & Suryadarma, D. (2022). *Reassessing Tuition Fees and Equity in Indonesian Public Universities*. *Jurnal Kebijakan Publik*.
5. UNESCO. (2021). *Education Transforms Lives: Global Education Monitoring Report*.
6. OECD. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*.
7. Bappenas. (2019). *RPJMN 2020–2024: Penguatan SDM untuk Indonesia Maju*.
8. United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
9. UUD 1945. Pasal 31.
10. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*.
11. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*.
12. UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report*.
13. OECD. (2021). *Education at a Glance*.
14. Tilak, J.B.G. (2008). *Higher Education: A Public Good or a Commodity for Sale?*. Prospects, UNESCO.
15. OECD. (2020, 2022). *Education at a Glance*.
16. UNESCO IESALC. (2020). *Higher Education in Latin America*.
17. DAAD. (2019). *Germany's Tuition-Free Higher Education Model*.
18. Booysen, S. (2016). *Fees Must Fall: Student Revolt, Decolonisation and Governance in South Africa*.
19. Jansen, J. (2019). *Decolonisation in Universities: The Politics of Knowledge*.
20. World Bank. (2018). *Reclaiming Education in Latin America*.
21. The Hindu. (2021). *Education Budget and the Reality of Access in India*.
22. United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
23. ementerian Keuangan RI. (2023). *APBN Kita – Realisasi Anggaran Pendidikan*.
24. BPS. (2023). *Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi*.
25. SMERU Research Institute. (2021). *Kesenjangan Akses Pendidikan Tinggi*.
26. OECD. (2021). *Higher Education Financing in Developing Countries*.
27. UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report*.

28. World Bank. (2020). *Financing Higher Education in Southeast Asia*.
29. Kemdikbudristek. (2022). *Rapor Pendidikan Tinggi Indonesia*.
30. RPJMN 2020–2024. Bappenas.
31. Tempo. (2023). *Sorotan Terhadap IPI dan Biaya Jalur Mandiri*.